



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IR. YUSUP PATIROY, MM.
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 172414

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 890.000.000

1. Tanah Seluas 8825 m2 di LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 72 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/150 m2 di KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/108 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah Seluas 260 m2 di KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 137.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 84.000.000

D. SURAT BERTAHAGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 225.372.973

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.336.372.973

III. HUTANG

Rp. 93.152.001



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.243.220.972

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.